

174

# ILMU POLITIK, ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ILMU KEPOLISIAN

( PIDATO ILMIAH DALAM RANGKA DIES NATALIS PTIK KE-44 )

18 Juni 1990

Oleh : Prof. Dr. Yuwono Sudarsono

## I. Pengantar

Kehormatan untuk menyampaikan pidato ilmiah pada Dies Natalis ke-44 PTIK ingin saya manfaatkan untuk berbagi pandangan tentang perkaitan antara Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Kepolisian. Sebagai alumnus Universitas Indonesia, kesempatan ini ingin saya manfaatkan juga untuk mempererat persahabatan antara Universitas Indonesia dengan PTIK, persahabatan yang sesungguhnya telah terjalin sebelum saya masuk UI hampir 30 tahun yang lalu.

Sebagaimana kita maklumi bersama, sasaran perhatian utama Ilmu Politik adalah *kekuasaan* pada umumnya, dan kekuasaan negara pada khususnya. Ilmu Hubungan Internasional mengkaji *kekuasaan negara* dalam hubungannya dengan kekuasaan negara-negara lain. Ilmu Kepolisian (termasuk dalam pengertian ini tentunya adalah Teknologi Kepolisian) berintikan ilmu dan pengetahuan yang bertujuan mengembangkan sistem pertahanan-keamanan secara swakarsa dengan Polri sebagai *alat negara* penegak hukum dan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat.

Jelaslah bahwa perkaitan antara ketiga bidang ilmu tadi bersifat langsung karena ketiga-tiganya berhubungan erat dengan masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan, baik keluar maupun ke dalam. Ketiga bidang ilmu langsung berhubungan erat dengan kajian-kajian sekitar pokok-pokok masalah seperti kekuasaan, kewenangan, keabsahan, ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pada itu, kita semua menyadari bahwa berbagai ahli, sarjana dan pakar dalam bidang ilmu masing-masing bisa berbeda pandangan dan pendapat tentang derajat keterkaitan antar setiap ilmu tadi. Masyarakat dan budaya Indonesia demikian luas, rumit dan majemuknya sehingga pengertian dan perumusan masalah yang dikategorikan dalam salah satu bidang ilmu bisa ditafsirkan secara berbeda dalam bidang ilmu lainnya. Karena itu izinkanlah saya mengemukakan pandangan sepihak saya tentang perkaitan antara ketiga bidang ilmu yang menjadi bahasan pidato ini.

## II. Ilmu Politik dan Ilmu Kepolisian

Salah satu *babasan* dan *bahasa*

politik yang baku di dalam Ilmu Politik dan Ilmu Kepolisian ialah konsep tentang Kepentingan umum. Dalam Ilmu Politik, *kekuasaan negara* kerap diartikan sebagai kekuasaan tertinggi yang ada dalam masyarakat untuk memutuskan apa yang akan dijadikan sebagai *kebijaksanaan umum*. Karena itu Ilmu Politik membahas masalah-masalah kenegaraan, terutama yang bertalian erat dengan sejumlah konsep dasar lain seperti kedaulatan rakyat, demokrasi, pendapat umum, partisipasi dan lain sebagainya. Ilmu Politik terutama mempelajari struktur sosial-budaya, sistem nilai serta tingkat kemajuan ekonomi dari kekuatan-kekuatan sosial politik yang pada akhirnya berikhtiar menentukan apa yang disebut sebagai kebijakan umum atau kepentingan nasional. Ilmu Kepolisian (dan terutama segi Teknologi Kepolisian) pada dasarnya lebih memperhatikan *segi-segi pelaksanaan* dari apa yang disebut sebagai kebijakan umum atau kepentingan nasional. Karena itu, dari beberapa segi, Ilmu Kepolisian pada hakekatnya lebih sulit untuk "diajarkan"; sekalian kecakapan, kemahiran dan kesempataan yang diberikannya sebenarnya hanya dapat diketahui setelah *kiat Kepolisian* itu teruji di lapangan.

Kita semua menyadari juga bahwa baik Ilmu Politik maupun Ilmu Kepolisian banyak mengandung konsep-konsep umum, menyeluruh dan padat kaidah serta petunjuk. Ini memang konsekuensi logis dari

pengertian umum tentang *masyarakat politik* (political community), polis, politea. Dalam pengertian *politik* dan *polisi* sudah melekat di dalamnya dorongan mengemban apa yang disebut sebagai kepentingan umum, kepentingan bersama, kepentingan nasional.

Tetapi marilah mengkaji secara selintas konsekuensi dari penerapan dan perincian apa yang disebut sebagai kepentingan umum, kepentingan bersama dan kepentingan nasional itu. Masyarakat dan negara kita terdiri dari berbagai ragam kelompok pemimpin beserta para pengikutnya yang berlatarbelakang sosial, budaya, politik dan ekonomi yang berbeda-beda. Ilmu Politik modern yang dikembangkan di mancanegara selang 20 tahun terakhir ini menekankan perlunya kita mempelajari kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi dan politik apa yang berusaha untuk ikut-serta menentukan kebijakan umum atau kebijakan negara.

Ilmu Politik modern juga memberi pelajaran kepada kita bahwa dalam setiap sistem politik dan sistem kenegaraan, ada lebih dari satu pusat kekuasaan (*power centres*) yang senantiasa berikhtiar untuk menjadikan pilihan nilai, pilihan kepentingan dan prioritas golongannya menjadi kebijakan umum atau kepentingan nasional. Di dalam sistem politik liberal, komunis maupun Pancasila, adanya pusat-pusat kekuasaan yang berbeda-beda adalah hal yang lumrah

dan wajar terlebih-lebih apabila dalam masyarakat dan budaya itu kemajemukan menjadi salah satu ciri pokok kehidupan bangsa.

Ilmu Politik karenanya memberi gambaran yang lebih jelas dan nyata bahwa rumus dan ungkapan "kepentingan umum" senantiasa diungkapkan oleh kekuatan sosial-politik yang berikhtiar untuk menentukan kebijaksanaan negara. Konsekuensi dari keadaan ini ialah bahwa pimpinan negara itu terdiri atas beberapa pusat kekuasaan yang berusaha untuk memajukan kepentingan kelompoknya masing-masing atas nama kepentingan umum dan kepentingan rakyat banyak.

Ilmu Politik memberi petunjuk bahwa kekuasaan politik dapat dikaji dari tiga gatra besar: *Lingkup*, *Konsentrasi* dan *Bobot*. Lebih dari 30 tahun yang lalu, Harold D. Lasswell menegaskan bahwa ketiga gatra dapat menjelaskan banyak hal dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di mana pun di dunia ini. *Lingkup kekuasaan* adalah hal yang berhubungan erat dengan cakupan kewenangan yang dimiliki seorang pejabat negara. Makin besar cakupan tugasnya, makin sulit ia mengendalikan rincian dari apa yang termasuk dalam cakupannya itu.

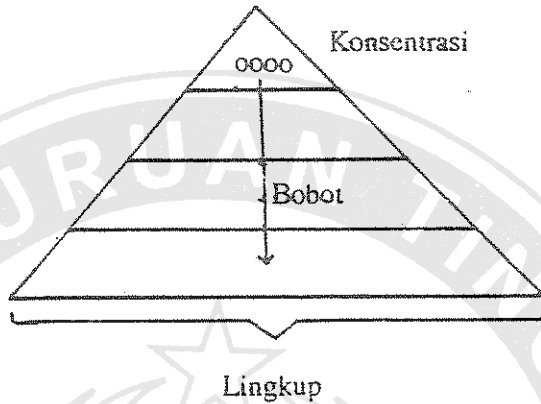
Gatra yang kedua ialah *konsentrasi kekuasaan*. Makin banyak pusat-pusat kekuasaan dalam tubuh negara dan pemerintah, maka ma-

kin harus ada "tawar menawar" antara satu pusat kekuasaan dengan pusat kekuasaan lainnya. Dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia, maka kekuasaan kenegaraan pun mau tak mau terdiri atas paduan berbagai pusat kekuasaan yang masing-masing mengajukan konsepnya tentang kepentingan umum dan kebijaksanaan negara. Seperti juga di negara-negara lain, kadang-kadang salah satu pusat kekuasaan unggul dalam menetapkan kebijaksanaan negara tertentu, kadang-kadang pusat kekuasaan lain lebih unggul menentukannya. Ilmu Politik mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap sistem politik, tidak ada satu pun satu pusat kekuasaan yang selalu unggul dalam menetapkan setiap kebijaksanaan negara.

Gatra ketiga adalah *bobot* kekuasaan. Sebagai konsekuensi logis dari adanya *Lingkup* dan *Konsentrasi* kekuasaan yang luas dan ganda, maka dalam *pelaksanaan* kebijaksanaan negara seringkali bobot kehadiran suatu kebijaksanaan bisa dirasakan hingga ke lapisan birokrasi yang paling bawah. Tapi ada kalanya bobot kebijaksanaan negara atau kepentingan umum itu terlambat atau tertelan oleh rumitnya birokrasi negara yang berlapis-lapis.

## Diagram Kekuasaan Politik

(Dari Harold D. Lasswell, *Power and Society*, Yale Univ., 1960)



Apakah konsekuensi dari telaah kajian Ilmu Politik terhadap Ilmu Kepolisian serta tugas-tugas nyata polisi pada khususnya? Bagaimana petugas dan pejabat kepolisian bertindak mengemban tugas kepentingan umum, keamanan dan ketertiban masyarakat dan kebijaksanaan negara manakala negara dan pemerintah itu sendiri terdiri dari pusat-pusat kekuasaan yang berbeda-beda, bahkan kerap bersaing dalam memajukan kepentingan kelompoknya sambil mengabaikan kepentingan rakyat banyak?

Dari pengalaman di beberapa negara maju maupun sedang berkembang kita mengetahui dilemma yang senantiasa dihadapi petugas keamanan dan ketertiban pada umumnya, polisi pada khususnya. Pada satu sisi, dengan segala peralatan dan pendanaan yang terbatas, mereka diharapkan selalu meningkatkan kemampuan aparat pemerin-

tah yang bersih dan berwibawa. Pada sisi lain, sebagai perwira atau bintanga kepolisian yang taat pada disiplin, setiap insan kepolisian tunduk dan taat pada tugas yang dilimpahkan kepadanya. Pada sisi lain lagi, setiap perwira atau bintanga polisi yang sedang meniti karier sadar bahwa pergantian pimpinan atau atasan menggambarkan adanya pergeseran kebijaksanaan yang disesuaikan dengan kehendak dan prioritas pejabat yang baru. Seperti juga petugas birokrasi negara lainnya, anggota Polri harus mempunyai "wawasan" tentang perkembangan atasan.

Akan tetapi, berbeda dengan seorang negarawan atau politikus, pejabat dan petugas Polri senantiasa berada dalam garis terdepan dalam sorotan masyarakat, pendapat umum dan kalangan yang berkecimpung dalam membela masyarakat luas seperti lembaga-lembaga

swadaya masyarakat. Petugas atau pejabat polisi secara klasik senantiasa terjepit antara dua desakan psikologis yang amat kuat: disiplin atas dasar hierarki organisasi kepolisian dan sanksi masyarakat yang segera diarahkan kepadanya manakala suatu persoalan keamanan dan ketertiban dirasakan kurang bisa cepat diatasi oleh polisi.

Dilema tugas kepolisian seperti itu dengan sendirinya bukanlah hal yang unik melekat pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dua puluh tahun yang lalu, Zbigniew Brzezinski menulis dalam buku *Between Two Ages: America In the Technetronic Society* (1970) bahwa luas dan kecepatan perubahan sosial politik akibat kemajuan teknologi elektronika telah berkembang sedemikian rupa sehingga tugas-tugas umum kepolisian tak mungkin lagi ditangani oleh polisi. Revolusi komunikasi dan komputerisasi merubah banyak pengertian tentang kekuasaan, kekayaan, kekuatan dan pengaruh sedemikian rupa sehingga tugas-tugas ketertiban umum lambat laun secara alami diserahkan kepada lembaga-lembaga baru dalam masyarakat. Bahkan pengertian "ketertiban umum itu sendiri mengalami perubahan justru karena tugas dan kewenangan kepolisian Amerika diambil alih oleh organisasi-organisasi non Kepolisian. Suatu kerjasama yang tak angung tetapi nyata terpaksa dialin antara polisi, jaksa penuntut umum serta organisasi kriminal ka-

rena kerumitan perubahan masyarakat memaksa perubahan makna apa yang "sah" dan "tidak sah".

Oleh karena itu, saya kira Ilmu Politik dapat memberi sumbangan yang lebih nyata lagi kepada Ilmu Kepolisian, khususnya yang bertalian dengan segi-segi sosial dan budaya, bahwa dalam tahun-tahun yang akan datang senjang antara kaidah atau himbauan di satu pihak dengan apa yang nyata-nyata berkembang dalam masyarakat tetap merupakan salah satu unsur pokok yang harus dihadapi oleh setiap insan yang memilih profesi kepolisian. Lebih daripada profesi lainnya, kepolisian semakin lama akan terpaksa untuk lebih *politicized* dalam kedua pengertiannya, yakni yang negatif maupun yang positif. Pada satu sisi, karena tugas-tugas kepolisian mencakup pengamanan dan penertiban kehidupan masyarakat yang makin rumit maka pelaksanaannya akan semakin menjadi bagian dari perbenturan perbedaan kepentingan kelompok-kelompok kekuasaan negara.

Pada sisi lain, kesadaran akan tali temalnya tugas-tugas kepolisian dengan perkembangan politik pada umumnya memberi peluang kepada profesi kepolisian untuk mengusahakan terciptanya perwira-perwira tangguh, terdidik dan terampil yang mampu mengatasi semakin canggihnya tingkat maupun frekuensinya kejahatan, termasuk kejahatan politik yang sangat kontroversial itu.

Dalam karyanya yang 'belum la-

ma ini diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris, seorang pengusaha Peru, Hernando de Soto mengungkapkan betapa sulitnya petugas-petugas negara menjalankan kewajibannya sebagai pengemban keter-tiban umum. Dalam bukunya yang berjudul *The Other Path: The Invisible Revolution in The Third World* (1990) De Soto melukiskan berapa petugas keamanan dan ketertiban semakin terjat dalam dilemma antara membawa kepentingan suatu golongan tertentu dalam negara atau pemerintah dengan kepentingan rakyat yang sesungguhnya. De Soto melukiskan keadaan di negaranya sebagai suatu perang abadi antara kehidupan formal (hal ikhwal yang digariskan aparaturn pemerintah, termasuk kepolisian) dengan kehidupan informal. Negara, kata De Soto, menjadi ajang perebutan kekuasaan, perebutan kewenangan dan perebutan keabsahan untuk setiap golongan yang berhasil memenangkan tampuk pemerintahan negara.

Dilukiskan oleh De Soto betapa aparaturn negara dalam perumahan, transportasi dan perdagangan telah memonopoli kehidupan masyarakat Peru sedemikian rupa sehingga masyarakat "berontak" dan menyusun kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang "informal". Kalau misalnya kepadatan hidup di daerah perkotaan sudah mencapai titik gawat, maka polisi tak berdaya untuk menghalau apalagi mengusir serbuan yang dilakukan oleh pen-

datang-pendatang baru dari pedesaan yang mencari nafkah di kota besar. Para penyerbu tersusun dalam organisasi yang rapi sehingga memiliki daya tawar-menawar yang tinggi melawan kewenangan sah dari aparaturn polisi. Bahkan dalam pemukiman liar yang serba luas di kota Lima, ibukota Peru, mereka berhasil menjamin sistem keamanan dan ketertiban yang disusun, dibiayai dan diawasi oleh mereka sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya terjadilah dua jenis kekuasaan, dua kewenangan dan dua keabsahan yang masing-masing mengatasnamakan "kepentingan umum".

Gambaran serupa ditemuinya di bidang perdagangan dan transportasi. Lebih dari 80% pasar di kota Lima adalah pasar "liar" yang didirikan oleh kaum pedagang kecil yang ingin mendapat tempat yang wajar untuk menyambung hidup. Lebih dari 70% sistem pengangkutan umum dalam kota Lima dikuasai oleh organisasi transportasi yang tidak terdaftar di balai kota ataupun di kantor kepolisian.

Dari sekilas gambaran di Peru itu kita dapat melihat bahwa kajian Ilmu Politik dapat memberi sorotan khusus pada tugas-tugas kepolisian kita dimasa-masa mendatang, terutama di kota-kota besar yang jumlah penduduknya lebih dari 2 juta orang. Pelajaran itu antara lain bahwa manakala kewenangan aparaturn resmi (birokrasi, kejaksaan, kepolisian, dan lain sebagainya) terlalu banyak mengatur kehi-

dupan masyarakat atas nama keter-tiban umum, maka pada suatu waktu kemampuan aparatur itu akan mencapai titik jenuhnya sehingga masyarakat akan terpaksa menciptakan suatu "sistem politik" tandingan. Dalam hal seperti itu, sulit dibayangkan dilema yang dihadapi oleh para pelaksana tugas kepolisian yang formal. Pada satu sisi ia adalah petugas yang berwenang dan sah, pada sisi lain di mata masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum dan sistem peradilan tidak menjangkau kepentingannya maka ia dianggap sebagai alat penindas masyarakat.

Sudah barang tentu pengamatan De Soto tidak sepenuhnya berlaku untuk Indonesia umumnya dan Jakarta pada khususnya, sekalipun ada cukup banyak persamaan yang memprihatinkan. De Soto misalnya tidak memberi jalan keluar bagaimana aparatur formal yang sudah erlanjur padat personalia itu bisa liciutkan tanpa mengguncangkan kehidupan politik dan kepentingan tokoh-tokoh politik formal. Ia juga curang mengamati kesulitan-kesulitan yang dihadapi petugas kehormatan, kejaksaan dan kepolisian kota Lima yang serba kekurangan (kurang makan, kurang gaji, kurang disayang masyarakat sekitar). Mereka cenderung dituding langsung sebagai sebab dan akibat "penindasan".

Kita di Indonesia mudah-mudahan tidak sampai menjurus kepada suatu situasi di mana sistem politik

kita tidak mampu lagi menjangkau mereka yang kurang mampu sehingga penduduk kota-kota besar di negara kita tidak melakukan penyerbuan-penyerbuan liar, menjalankan usaha liar dan melaksanakan sistem transportasi umum yang di luar jangkauan kewenangan hukum. Karena masalah-masalah seperti yang digambarkan De Soto itu ada miripnya dengan situasi di negara kita, ada baiknya kita lebih banyak melakukan kajian-kajian antar-disiplin dan antar instansi, khususnya antara bidang ilmu sosial, ekonomi dan budaya di perguruan tinggi dengan ilmu kepolisian.

### III. Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Kepolisian

Salah satu kata kunci yang akhir-akhir ini disebutkan di mana-mana ialah "globalisasi" masalah-masalah yang kita hadapi di hampir setiap bidang kehidupan kita sebagai bangsa. Oleh karena itu wajarlah bila perhatian Ilmu Kepolisian pun sudah lama memperhatikan gejala-gejala yang bersifat regional dan internasional.

Telah banyak diajukan telaah dan kajian oleh berbagai ahli dan pakar dari aneka ragam bidang ilmu bahwa cakupan, kecepatan dan intensitas *globalisasi* tugas kepolisian memerlukan koordinasi dan kerjasama baik antar negara dan antar instansi polisi di seluruh pelosok dunia. Sumbangan Ilmu Hubungan Internasional terhadap Ilmu Kepolisian adalah dalam mem-

berikan wawasan yang lebih luas akan hal-hal yang bersifat *geo-politis* maupun yang bersifat fungsional.

Ilmu Hubungan Internasional yang bergatra *Geo-Politik* memperkuat wawasan perwira peserta didik bahwa tugas-tugas klasik keamanan dan ketertiban adalah memelihara persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ilmu Hubungan Internasional menegaskan tetap penting dan bertahannya pengertian Negara-Kebangsaan sebagai acuan pokok Indonesia dalam pergaulan antar bangsa dan antar budaya.

Tugas-tugas Ilmu Hubungan Internasional adalah dalam memberi gambaran yang terus-menerus di mutakhirkan sebagai sarana memperkuat keberadaan Indonesia sebagai Negara Siaga (*Security State*). Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam artian ini berarti memberi layanan yang sedemikian rupa sehingga seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap merupakan tempat tumpah darah Indonesia yang patut dipertahankan oleh putra-putri Bangsa. Ilmu Hubungan Internasional dalam arti yang demikian menekankan perlunya dipupuk terus paham-paham dan praktek-praktek, pembinaan territorial, baik dalam arti kewilayahan maupun dalam artian kependudukan. Contoh yang aktual adalah penerbitan dan pengamanan warganegara Indonesia yang bermukim di Indonesia tetapi mencari nafkah di

sekitar perbatasan dan di dalam wilayah negara Malaysia.

Ilmu Hubungan Internasional yang bergatra *fungsional* lebih menekankan segi-segi ilmu dan wawasan global yang bersifat lintas benua seperti misalnya teknologi informasi, perdagangan dan investasi internasional, hak-hak milik intelektual, hak-hak azasi, narkotika serta pokok-pokok masalah yang bertalian dengan Negara Niaga (*Trading State*) Dalam karyanya yang kini diakui menjadi salah satu tulisan klasik, Richard Rosecrance mengupas peran *The Rise of the Trading State* (1986) sebagai salah satu benang merah sejarah dunia yang amat penting. Hubungan Internasional, katanya, semakin ditandai oleh persaingan kemampuan mengolah gagasan, menjual gagasan dan menciptakan gagasan. Bangkitnya Inggris pada abad 19, Amerika pada awal abad ke-20 dan Jepang menjelang abad 21, ditandai oleh kemampuan bangsa menyusun jalinan mata-rantai antara ilmu, pengetahuan dan perdagangan.

Salah satu segi dari usaha memajukan diri sebagai negara adalah ikhtiar untuk menguasai dan mengendalikan "aturan permainan" internasional melalui perjanjian internasional ataupun melalui sanksi-sanksi ekonomi. Saling pengaruh dan saling mengisi antar bangsa dan antar perekonomian memerlukan kemampuan polisi nasional ikut mengamankan apa yang dipandanginya sebagai *asset* nasional. Karena



itu salah satu fungsi utama dari tugas kepolisian nasional dimasa-masa mendatang adalah untuk secara berangsur-angsur meningkatkan wawasan sains dan teknologi, khususnya yang dapat diolah menjadi gagasan, barang atau teknik yang diperjual belikan di pasaran Internasional. Oleh karena definisi dan makna dari kekayaan atau asset sewaktu-waktu dapat berubah akibat penemuan atau hasil penelitian baru, dengan sendirinya Ilmu Kepolisian dimasa mendatang harus mampu menyusun daftar sekitar apa yang 5 atau 10 tahun mendatang akan berkembang sebagai kekayaan atau asset nasional.

Globalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi dan bisnis internasional juga menantang para pengelola di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian untuk memahami gejala umum yang akhirnya ini melanda keseluruhan pelosok dunia, khususnya di Asia-Pasifik. Pada tahun 1960an gejala itu disebut sebagai internasionalisasi, pada tahun 1970an sebagai multinasionalisasi, pada tahun 1980an dikenal sebagai transnasionalisasi dan kini pada tahun 1990an globalisasi. Ada beberapa kalangan yang malah mengatakan bahwa globalisasi sama dengan munculnya perusahaan-perusahaan tanpa negara ("The Stateless Corporation", *International Business Week*, 8 May, 1990).

Menurut paham ini, proses globalisasi makin tidak mengenal perbedaan kebangsaan dan batas kenega-

raan karena semua usaha melihat seluruh dunia sebagai satu kesatuan pasar dengan pijakan-pijakan yang berbeda. Pemilik modal Kanada membeli perusahaan Amerika yang dikelola oleh orang-orang Eropah Barat dan Jepang dan yang memanfaatkan sumber daya manusia Asia yang mengolah sumber daya alam Amerika Latin. Dalam gejala demikian, fungsi dan tugas kepolisian adalah menegaskan kembali makna dan kedudukan kepentingan nasional dan kepentingan umum dalam hubungannya dengan kedudukan Indonesia sebagai bangsa yang ingin mempertahankan keberadaannya di tengah-tengah perubahan dunia yang semakin kompetitif. Tugas-tugas kepolisian untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat mengandung unsur-unsur mengembangkan kesejahteraan masyarakat dan mengusahakan agar sebanyak mungkin peluang diberikan kepada tunas-tunas bangsa kita mengembangkan bakat serta keahliannya. Tugas-tugas ini pada awal maupun pada akhirnya adalah gatra internasional dari sumbangan Ilmu Hubungan Internasional terhadap Ilmu Kepolisian.

Baik gatra Geo-Politik maupun Gatra Fungsional dari Ilmu Hubungan Internasional merupakan pokok-pokok yang perlu dipahami dan diketahui oleh para calon pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada satu sisi, kita adalah tetap orang Indonesia di tengah-tengah proses globalisasi

informasi, perdagangan, dan teknologi. Pada sisi lain globalisasi adalah bagian dari kecenderungan dunia yang tidak bisa kita abaikan, walaupun kita misalnya berusaha untuk menghalukannya. Karena itu, wawasan yang diberikan oleh Ilmu Hubungan Internasional terhadap Ilmu Kepolisian adalah dalam mempertebal rasa kebangsaan kita melalui ikhtiar meneruskan perjuangan menegakkan Negara Siaga atau Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada sisi lain, Ilmu Hubungan Internasional diharapkan menyiapkan peserta didik Ilmu Kepolisian bahwa persaingan antar bangsa menuntut kesadaran minimal tentang kecenderungan-kecenderungan global.

Dalam hubungan inilah saya melihat bahwa perpaduan ilmu dan ketrampilan yang disajikan di PTIK mampu juga menjawab tantangan-tantangan zaman pada tahun-tahun mendatang. Para lulusan PTIK dimasa lampau sudah terbukti mampu menekuni sejumlah bidang pekerjaan, profesi atau penugasan yang pada hakekatnya di luar dari jalur utama keahlian dan profesi kepolisian. Mungkinkah ditahun-tahun mendatang akan dapat dikembangkan kerjasama dengan instansi pendidikan negeri maupun swasta secara lebih melembaga tetapi juga bervariasi sehingga PTIK ikut mempersiapkan kader-kader pimpinan bangsa dari berbagai jenjang keahlian yang baru, yang

mungkin belum sempat terpikirkan saat ini?

Sebagaimana telah disampaikan pada awal uraian ini, perkaitan erat antara Ilmu Politik, Ilmu Hubungan Internasional dan Ilmu Kepolisian pada dasarnya berakar dari *landasan kenegaraan* dari kehidupan kita sebagai bangsa yang merdeka. Ilmu Politik menitipkan pesan kepada kita bahwa hampir semua kegiatan kita sebagai bangsa mencakup peran dan kewenangan negara. Ilmu Hubungan Internasional menyadarkan kepada kita bahwa kelangsungan bangsa untuk sebagian akan ditentukan oleh cara kita bertarung dalam bidang ilmu dan teknologi yang dikuasai bangsa-bangsa lain. Ilmu Kepolisian yang mengandalkan swakarsa sebagai titik sentral keamanan dan kesejahteraan masyarakat mengajarkan kepada kita bahwa masyarakat juga yang akhirnya memberi warna pada corak kepolisian yang berkembang di negeri kita.

Karena itu, marilah kita kembangkan secara berangsur tetapi pasti bukan hanya kekuasaan dan kewenangan aparat *negara* dan *pemerintah*, karena kita sudah cukup lama mengembangkannya. Marilah kita sama-sama membangun suatu *masyarakat* yang tangguh, yang berani namun berdisiplin, yang kreatif sekaligus terarah.

Sudah cukup lama masyarakat dan bangsa kita diajak dan dihimbau untuk bekerjasama dengan alat

negara, pejabat negara dan instansi pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Kini tiba saatnya kita membangun bersama suatu masyarakat yang lebih tangguh, yang benar-benar berlandaskan swakarsa, suatu *civil society* di mana para warga kita berperan penuh dalam masalah-masalah kenegaraan dan kemasyarakatan. Lebih dari itu, dalam arti Ilmu Kepolisian, kita membangun bersama masyarakat yang *self-policing*.

Masyarakat yang demikianlah yang dalam kajian Ilmu Politik disebut sebagai masyarakat yang mantap dan matang, *a stable and mature society*. Masyarakat dan bangsa yang demikianlah yang dalam Ilmu Hubungan Internasional mampu menciptakan suasana bersahabat dengan para tetangganya di Asia Tenggara, *a comity of Southeast Asian nations*. Masyarakat dan bangsa yang demikianlah yang juga patut diperjuangkan oleh Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian!

#### Daftar Acuan :

1. Harold D. Lasswell, *Power and Society*, Yale University Press, 1960.
2. Zbigniew Brzezinski, *Between Two Ages*, Viking Press, 1970.
3. Richard Rosecrance, *The Rise of the Trading State*, Basic Books, 1980.
4. Hernando de Soto, *The Other Path*, Harper & Row, 1990.
5. United Nations Development Programme, *Human Development Report*, 1990.
6. "The Stateless Corporation", *International Business Week*, May 8, 1990.

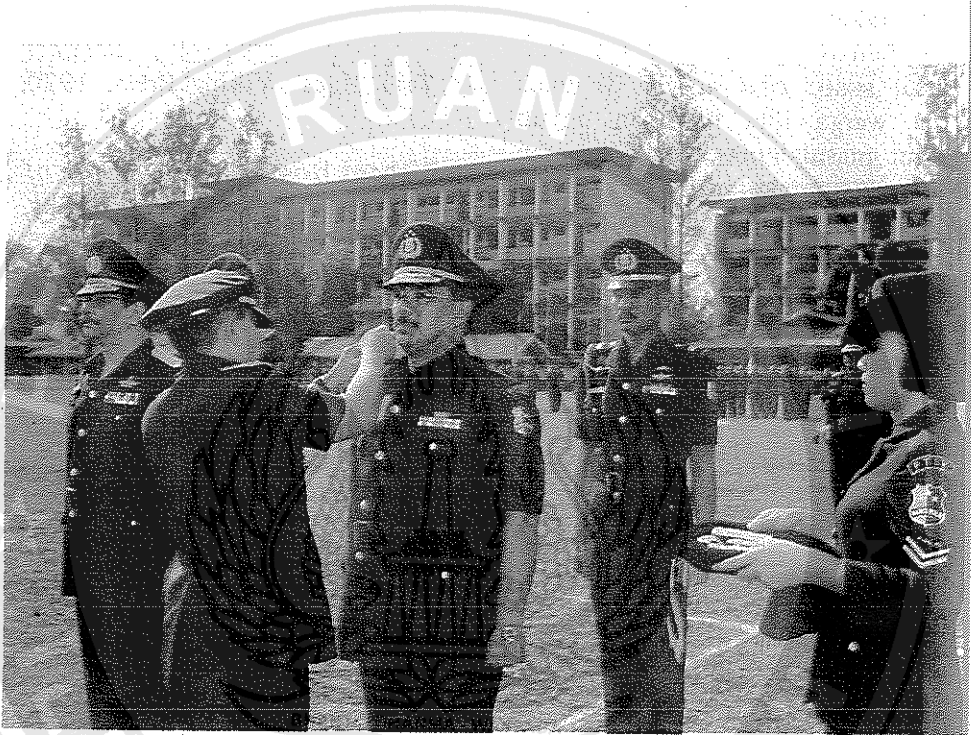
## PT. BHARA TECHNO NUSANTARA

Jln. Tebet Barat No. 63 Jakarta 12810, P.O. Box. 4300/JKT Telp. 8290297, 8282280.  
Telex : 062 021 600319 TIMBAR IA Fax: 62 21 8282281

Mengucapkan Selamat  
HUT BHAYANGKARA KE-44

1 Juli 1990

## LINTASAN PERISTIWA



### SERAH TERIMA JABATAN

Tanggal 4 Agustus 1990 telah dilaksanakan upacara serah terima jabatan Gubernur PTIK yang lama dari MAYOR JENDERAL POLISI (PURN) Drs. SOETJIPNO kepada penggantinya yaitu BRIGADIR JENDERAL POLISI Drs. ADJI LOEKMAN HAKIM di lapangan olah raga PTIK.

### GAMBAR :

KAPOLRI JENDERAL POLISI Drs. MOCH. SANUSI sedang menyematkan Tanda Pangkat Jabatan Kepada Gubernur PTIK yang baru.